

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.HH-07.OT.01.03 TAHUN 2011**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Umum

Lembaga pemasyarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka lembaga pemasyarakatan perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana agar dapat melaksanakan program pembinaan warga binaan pemasyarakatan secara maksimal.

Pada saat ini kondisi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara sebagian besar mengalami over kapasitas. Jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia sudah jauh melebihi kapasitas yang seharusnya. Kondisi overkapasitas akan menimbulkan terjadinya berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan para narapidana, seperti kasus perkelahian antarnarapidana serta kasus tindak pidana lainnya. Overkapasitas juga mengakibatkan menurunnya pelayanan dan perawatan, rentan gangguan keamanan dan ketertiban, melemahnya rentang kendali dan pengawasan.

Kondisi overkapasitas ini sudah berlangsung lama dan hampir terjadi di seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Indonesia terutama yang berada di kota besar. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, misalnya dengan pembangunan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara baru pada wilayah pemekaran untuk menambah kapasitas hunian. Selain itu juga dilakukan rehabilitasi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara lama dengan penambahan ruang hunian, optimalisasi pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, dan cuti bersyarat. Dengan langkah seperti itu diharapkan kelebihan penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang cukup besar bisa diatasi.

Pembangunan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang baru, rehabilitasi, dan rekonstruksi dilakukan sebagai upaya mengatasi kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Pembangunan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara baik dalam bentuk rehabilitasi maupun rekonstruksi merupakan salah satu upaya meningkatkan kapasitas hunian dalam rangka mengatasi over kapasitas, meningkatkan

kualitas pelayanan serta menjamin penyelenggaraan pembinaan dan pengamanan secara lebih baik.

Pemenuhan sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara merupakan keharusan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, sehingga kebijakan penganggaran harus mempertimbangkan risiko yang timbul akibat tidak dipenuhinya sarana dan prasarana tersebut. Diperlukan perencanaan pembangunan yang baik agar masalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dapat diatasi.

Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menyusun pola pembangunan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara untuk menangani masalah overkapasitas dengan menyusun Peraturan Menteri tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Induk ini sebagai acuan untuk:

- a. merencanakan pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang komprehensif berdasarkan analisa kebutuhan dan skala prioritas sesuai dengan rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. merencanakan pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sehingga dapat menyelesaikan masalah overkapasitas.

C. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Induk adalah rencana yang disusun oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membangun Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
2. Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut UPT Pemasyarakatan adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pemasyarakatan di wilayah masing-masing.
3. Unit pelaksana teknis di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Rumah Tahanan Negara adalah selanjutnya disebut Rutan adalah unit pelaksana teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II
STRATEGI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN UPT PEMASYARAKATAN

A. Penyusunan Rencana Pembangunan UPT Pemasyarakatan

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Lapas atau Rutan perlu dibuat skala prioritas pembangunan Lapas dan Rutan pada wilayah yang mengalami overkapasitas atau wilayah yang dimungkinkan sebagai penyangga over kapasitas. Pembangunan UPT Pemasyarakatan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok prioritas:

1. **Prioritas I yaitu wilayah yang memiliki overkapasitas di atas 75%**

No.	Wilayah	Kapasitas	Isi	Over Kapasitas	Persentase (%)
1	Sumatera Utara	6674	15194	8520	128
2	Kepulauan Riau	1072	1996	924	86
3	Riau	1555	4697	3142	202
4	Jambi	978	2103	1125	115
5	Bengkulu	730	1298	568	78
6	DKI Jakarta	5056	10921	5865	116
7	Jawa Barat	7808	15206	7398	95
8	Kalimantan Timur	1642	3814	2172	132

2. **Prioritas II yaitu wilayah yang memiliki overkapasitas 50% sampai dengan 75%**

No.	Wilayah	Kapasitas	Isi	Over Kapasitas	Persentase (%)
1	Sumatera Selatan	4028	6187	2159	54
2	Nangroe Aceh Darussalam	1973	3433	1460	74
3	Kalimantan selatan	2404	3716	1312	55
4	Kalimantan Barat	1500	2523	1023	68

3. **Prioritas III yaitu wilayah yang memiliki overkapasitas kurang dari 50%**

No.	Wilayah	Kapasitas	Isi	Over Kapasitas	Persentase (%)
1	Lampung	2887	4312	1425	49
2	Sumatera Barat	1951	2448	497	25
3	D.I. Yogyakarta	913	1241	328	36
4	Jawa Timur	10682	15513	4831	45
5	Sulawesi Tengah	1180	1576	396	34
6	Sulawesi Tenggara	1035	1498	463	42
7	Bangka Belitung	860	969	109	12
8	Jawa Tengah	11736	9805	-	-
9	Kalimantan Tengah	1912	1711	-	-
10	Sulawesi Utara	1630	1539	-	-
11	Gorontalo	410	566	156	19
12	Sulawesi Selatan	4661	3717	-	-
13	Bali	1432	1712	280	17
14	Nusa Tenggara Timur	2820	2828	8	6
15	Maluku	1360	772	-	-
16	Maluku Utara	1023	554	-	-
17	Papua Barat	436	401	-	-
18	Papua	1558	1199	-	-
19	Nusa Tenggara Barat	1196	1616	420	35
20	Banten	3163	4542	1379	44
21	Sulawesi Barat	334	400	66	20

Berdasarkan data kapasitas tersebut, wilayah yang menjadi prioritas utama pembangunan Lapas atau Rutan dalam rangka menambah kapasitas hunian tidak hanya mempertimbangkan persentase overkapasitas melainkan juga harus mempertimbangkan jumlah kelebihan penghuni Lapas atau Rutan masing-masing wilayah.

Adapun wilayah yang menjadi prioritas utama adalah pertimbangan kelebihan penghuni di atas 1500 (seribu lima ratus)

orang, sehingga mendesak untuk dibangun Lapas atau Rutan sebagai penyangga overkapasitas, yaitu:

No.	Wilayah	Kapasitas	Isi	Over Kapasitas	Persentase (%)
1	Sumatera Utara	6674	15194	8520	128
2	Riau	1555	4697	3142	202
3	DKI Jakarta	5056	10921	5865	116
4	Jawa Barat	7808	15206	7398	95
5	Kalimantan Timur	1642	3814	2172	132
6	Sumatera Selatan	4028	6187	2159	54
7	Jawa Timur	10682	15513	4831	45

B. Pelaksanaan Rencana Pembangunan UPT Pemasyarakatan

Pelaksanaan rencana pembangunan UPT Pemasyarakatan harus berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas yang berkesinambungan.

Upaya yang dilakukan dalam penambahan kapasitas harus sesuai dengan anggaran yang tersedia sehingga diperlukan strategi dalam menentukan rencana pembangunan yang meliputi:

- 1. Pembangunan Baru**

Pembangunan baru dilakukan pada wilayah yang mengalami overkapasitas lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dengan ambang kelebihan kapasitas melebihi 1500 (seribu lima ratus) orang.
- 2. Pembangunan Kembali**

Pembangunan kembali atau rekonstruksi dilakukan sebagai upaya penataan kembali UPT Pemasyarakatan yang mengalami overkapasitas 50 % (lima puluh persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen). Pembangunan kembali dilakukan apabila pada lokasi tersebut masih dimungkinkan dari segi tata ruang dan luas lahan yang tersedia, namun apabila tidak dimungkinkan maka dilakukan relokasi ke tempat lain yang masih berada pada wilayah yang sama sehingga dalam operasionalnya masih menggunakan satuan organisasi lama.
- 3. Pembangunan Baru pada Daerah Pemekaran Wilayah**

Pembangunan UPT Pemasyarakatan baru yang dilaksanakan pada daerah pemekaran wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan instansi penegakkan hukum di wilayah tersebut.
- 4. Rehabilitasi atau Renovasi**

Rehabilitasi atau renovasi dilakukan pada UPT Pemasyarakatan yang masih dimungkinkan untuk ditambah kapasitasnya dengan tingkat overkapasitas sampai dengan 50% (lima puluh persen).

C. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan terhadap implementasi pembangunan UPT Pemasyarakatan dilakukan secara berkala dengan fokus terhadap tindak lanjut temuan mencakup capaian kerja dan kendala. Selain pemantauan, hal lain yang harus dilakukan adalah evaluasi terhadap hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Hasil evaluasi akan digunakan untuk perumusan kebijakan, perencanaan dan implementasi pembangunan UPT Pemasyarakatan selanjutnya.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan UPT Pemasyarakatan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

D. Peta Jalan (Road Map) Pembangunan UPT Pemasyarakatan 2012-2015

Peta jalan pembangunan UPT Pemasyarakatan sebagai berikut:

PEMBANGUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN TAHUN 2012

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
1	NANGROE ACEH DARUSSASALAM	NANGROE ACEH DARUSSASALAM	NANGROE ACEH DARUSSASALAM
	LPKN Langsa (Sarana Operasional)	LP Bener Meriah (Target Minimal Operasional 2013)	LP Banda Aceh (Lanjutan)
	LP wanita Sigli (sarana operasional)	LP Blangpidie (Target Minimal Operasional 2015)	Cabang Rutan Lokh Nga (Lanjutan)
			Cabang Rutan Singkil (Lanjutan)
2	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara
	LPKN Pematang Siantar (sarana operasional minimal)	LP Langkat (Target Minimal Operasional 2014)	Rutan Medan (Rekonstruksi)
		LPKN Langkat (Target Minimal Operasional 2014)	
		Rutan Humbang Hasundutan (Target Minimal Operasional 2014)	
3	Riau	Riau	Riau
	Lapas Pekanbaru/kulim (Lanjutan) [minimal operasional]	LP Terbuka Rumbai (Target Minimal Operasional 2013)	
4	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat
		LPKN Sawah Lunto (Target Minimal Operasional 2013)	Rutan Talu (Lanjutan)
		Rutan Sawahlunto (Target Minimal Operasional 2014)	Lapas Wanita Bukit Tinggi (Lanjutan)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
		LP Dharmasraya (Target Minimal Operasional 2014)	Lapas Klas II A Payakumbuh (Usulan Relokasi)
			Rutan Klas II B Painan (Usulan Relokasi)
			Rutan Padang
5	Jambi	Jambi	Jambi
	LP Muara Sabak (Tanjung Jabung Timur) [saran operasional]	LP Sarolangun (Target Minimal Operasional 2013)	
6	Bengkulu	Bengkulu	Bengkulu
			Lapas Bengkulu baru (Usulan Relokasi)
			Lapas Mokomuko (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Lebong (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Kepahiang (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Kaur (Usulan Pembangunan Baru)
7	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan
	LP Kayu Agung (minimal operasional; Sarana operasional)	LPKN Palembang (Target Minimal Operasional 2014)	Lapas Palembang (Merah Mata)
	LP Banyu Asin (minimal operasional; Sarana Operasional)		Lapas Waykanan (Lanjutan)
			Rutan Pagar Alam (Relokasi Lanjutan)
8	Lampung	Lampung	Lampung
	LP Anak Bandar Lampung (minimal Operasional; sarana operasional)		Lapas Kotabumi (Usulan Pembangunan Baru)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
9	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau
	LPKN Tanjung Pinang (sarana minimal operasional)	LP Natuna (Target Minimal Operasional 2015)	Rutan Batam (Lanjutan)
10	Bangka Belitung	Bangka Belitung	Bangka Belitung
	LPKN Pangkal Pinang (sarana operasional)		
11	Banten	Banten	Banten
		Rutan Cilegon (Target Minimal Operasional 2014)	Rutan Tangerang (Lanjutan)
12	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta
			Rutan Salemba (Lanjutan)
			Lapas Cipinang (Lanjutan)
13	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat
	LP Banjar (sarana minimal operasional)	LP Anak Bandung (Target Minimal Operasional 2013)	Lapas Narkotika Bandung (Lanjutan)
		Rutan Garut (Target Minimal Operasional 2013)	Rutan Bandung (Lanjutan)
		LP Gunung Sindur (Target Minimal Operasional 2014)	Lapas Klas II A Bandung (Lanjutan)
		Rutan Gunung Sindur (Target Minimal Operasional 2014)	Lapas Cibinong (Lanjutan)
		LP Cikarang Bekasi (Target Minimal Operasional 2014)	Lapas Bogor (Lanjutan)
		Rutan Depok (Target Minimal Operasional 2014)	Lapas Wanita Gunung Sindur (Usulan Pembangunan Baru)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
			Lapas Pasir Jambu (Usulan Pembangunan Baru)
			LPKN Gunung Sindur (Usulan Pembangunan Baru)
14	Jawa Tengah	Jawa Tengah	Jawa Tengah
			Lapas Pasir Putih Nusakambangan (Lanjutan)
			Lapas Narkotika Nusakambangan (Lanjutan)
			Lapas Batu NK (Lanjutan)
			Lapas Klas II A Pekalongan (REKONSTRUKSI)
			Lapas Purwokerto (Relokasi Lanjutan)
			Rutan Wonosobo (Usulan Relokasi)
15	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur
		LPKN Madiun (Target Minimal Operasional 2014)	Rutan Klas I Surabaya (Rekonstruksi)
		LPKN Pamekasan (Target Minimal Operasional 2014)	
16	D.I. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
			Lapas Wirogunan (Lanjutan)
17	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat
			Rutan Bengkayang (Lanjutan)
			Lapas Wanita Pontianak (Usulan Pembangunan Baru)
18	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah
	LPKN Kasongan (sarana operasional)	LP Sukamara (Target Minimal Operasional 2014)	
	Rutan/Lapas Tamiang Layang		

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
	(sarana Operasional)		
19	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan
	LP Banjar Baru (Sarana minimal operasional)		
20	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
	Rutan Bontang (sarana operasional)	Rutan Penajem Pasir Utara (Target Minimal Operasional 2015)	Lapas / Rutan Sendawar (Usulan Pembangunan Baru)
21	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
			Rutan Selayar (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Makale (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Sengkang (Lanjutan)
			Lapas Anak Pare-Pare (Lanjutan)
22	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara
			Rutan Raha (Relokasi Lanjutan)
23	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah
			Rutan Poso (Lanjutan)
			Cabang Rutan Kolonedale (Lanjutan)
			Cabang Rutan Leok (Pembangunan Lanjutan)
24	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat
		LP anak Mamuju (Target Minimal Operasional 2014)	

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
		LP Wanita Mamuju (Target Minimal Operasional 2014)	
		Rutan Pasang Kayu Mamuju Utara	
25	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara
			Cabang Rutan Amurang (Lanjutan)
26	Gorontalo	Gorontalo	Gorontalo
	LP Pahuwato (sarana minimal operasional dan prasana lingkungan)		
27	Bali	Bali	Bali
		LPKN Bangli (Target Minimal Operasional 2015)	
28	NTB	NTB	NTB
	LP Anak Mataram (sarana operasional)		
	LP Terbuka Mataram [pembangunan kantor dan blok hunian]		
29	NTT	NTT	NTT
			Lapas Anak Kupang (Lanjutan)
30	Maluku	Maluku	Maluku
			Lapas Piru (Lanjutan)
			Cabang Rutan Saparua (Lanjutan)
31	Maluku Utara	Maluku Utara	Maluku Utara
	Rutan Weda (sarana operasional)		Rutan Ternate (Lanjutan)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
32	Papua Barat	Papua Barat	Papua Barat
	Rutan Bintuni (sarana minimal operasional)	Rutan Raja Ampat (Target Minimal Operasional 2015)	
33	Papua	Papua	Papua
			Lapas Abepura (Lanjutan)
			Lapas Merauke (Lanjutan)

PEMBANGUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN TAHUN 2013

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
1	NAD	NAD	NAD
	LP Bener Meriah	LP Blangpidie (Target Minimal Operasional 2015)	LP Banda Aceh (Lanjutan)
			Cabang Rutan Lokh Nga (Lanjutan)
			Cabang Rutan Singkil (Lanjutan)
			LP Wanita Sigli
			LPKN Langsa Lanjutan
2	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara
		LP Langkat (Target Minimal Operasional 2014)	Rutan Medan (Rekonstruksi)
		LPKN Langkat (Target Minimal Operasional 2014)	LPKN Pematang Siantar (Lanjutan Prioritas I)
		Rutan Humbang Hasundutan (Target Minimal Operasional 2014)	
3	Riau	Riau	Riau
	LP Terbuka Rumbai		Lapas Pekanbaru (kulim) (Lanjutan)
4	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat
	LPKN Sawahlunto	Rutan Sawahlunto (Target Minimal Operasional 2014)	Rutan Talu (Lanjutan)
		LP Dharmasraya (Target Minimal Operasional 2014)	Lapas Wanita Bukit Tinggi (Lanjutan)
			Rutan Padang
			Rutan Klas II B Painan (Usulan Relokasi)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
			LP Payahkumbuh (Usulan Relokasi)
			LP Lubuk Basung (Lanjutan)
5	Jambi	Jambi	Jambi
	LP Sarolangun		LP Muara Sabak (Tanjung Jabung Timur) (Lanjutan)
6	Bengkulu	Bengkulu	Bengkulu
			Lapas Bengkulu Baru (Relokasi Lanjutan)
			Lapas Mokomuko (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Lebong (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Kepahiang (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Kaur (Usulan Pembangunan Baru)
7	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan
	LP Kayu Agung	LPKN Palembang (Target Minimal Operasional 2014)	Lapas Palembang (Merah Mata)
	LP Banyu Asin		Lapas Waykanan (Lanjutan)
			Rutan Pagar Alam (Relokasi Lanjutan)
8	Lampung	Lampung	Lampung
			Lapas kotabumi (Usulan Pembangunan Baru)
			LP Anak Bandar Lampung
			LP Gunung Sugih
9	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau
		LP Natuna (Target Minimal Operasional 2015)	rutan batam (Lanjutan)
			LPKN Tanjung Pinang (lanjutan)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
10	Bangka Belitung	Bangka Belitung	Bangka Belitung
			LPKN Pangkal pinang
11	Banten	Banten	Banten
		Rutan Cilegon (Target Minimal Operasional 2014)	Rutan Tangerang (Lanjutan)
12	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta
			Rutan Salemba (Lanjutan)
			Lapas Cipinang (Lanjutan)
13	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat
	LP Anak Bandung	LP Gunung Sindur (Target Minimal Operasional 2014)	Lapas Narkotika Bandung (Lanjutan)
	Rutan Garut	LP Cikarang Bekasi (Target Minimal Operasional 2014)	Rutan Bandung (Lanjutan)
		Rutan Depok (Target Minimal Operasional 2014)	Lapas Klas II A Bandung (Lanjutan)
		Rutan gunung sindur (Target Minimal Operasional 2014)	Lapas Cibinong (Lanjutan)
			Lapas Bogor (Lanjutan)
			Lapas Wanita Gunung Sindur (Usulan Pembangunan Baru)
			Lapas Pasir Jambu (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Tangerang (Lanjutan)
			LP Sukabumi Warungkiara Lanjutan Prioritas I 2012
			LP Banjar Lanjutan Prioritas I 2012

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
			LPKN Gunung Sindur (Usulan Pembangunan Baru)
14	Jawa Tengah	Jawa Tengah	Jawa Tengah
			Lapas Pasir Putih Nusakambangan (Lanjutan)
			Lapas Narkotika Nusakambangan (Lanjutan)
			Lapas Batu NK (Lanjutan)
			Lapas Klas II A Pekalongan (Rekonstruksi)
			Lapas Purwokerto (Relokasi Lanjutan)
			Rutan Wonosobo (Usulan Rekonstruksi)
15	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur
		LPKN Madiun (Target Minimal Operasional 2014)	Rutan Klas I Surabaya (Rekonstruksi)
		LPKN Pamekasan (Target Minimal Operasional 2014)	
16	D.I. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
			Lapas Wirogunan (Lanjutan)
17	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat
			Rutan Bengkayang (Lanjutan)
			Lapas Wanita Pontianak (Usulan Pembangunan Baru)
18	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah
		LP Sukamara (Target Minimal Operasional 2014)	Rutan Tamiang Layang
19	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan
			LPKN Karang intan (Lanjutan Prioritas I 2012)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
			LP Banjar Baru (Lanjutan Prioritas I 2012)
20	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
		Rutan Penajem Pasir Utara (Target Minimal Operasional 2015)	Rutan Bontang Lanjutan prioritas I 2012
			LPKN Samarinda Kalimantan Timur (Lanjutan Prioritas I 2012)
			Lapas / Rutan Sendawar (Usulan Pembangunan Baru)
21	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
			Rutan Selayar (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Makale (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Sengkang (Lanjutan)
			Lapas Anak Pare-Pare (Lanjutan)
22	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara
			Rutan Raha (Relokasi Lanjutan)
23	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah
			Rutan Poso (Lanjutan)
			Cabang Rutan Kolonedale (Lanjutan)
			Cabang Rutan Leok (Lanjutan)
24	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat
		LP anak Mamuju (Target Minimal Operasional 2014)	Rutan Pasang Kayu Mamuju Utara
		LP Wanita Mamuju (Target Minimal Operasional 2014)	
25	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara
			Cabang Rutan Amurang (Lanjutan)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
26	Gorontalo	Gorontalo	Gorontalo
			LP Pahuwato
27	Bali	Bali	Bali
		LPKN Bangli (Target Minimal Operasional 2015)	
28	NTB	NTB	NTB
	LP terbuka Mataram		LP Anak Mataram
29	NTT	NTT	NTT
			Lapas Anak Kupang (Lanjutan)
			LP Wanita Kupang
			LP Lembata
30	Maluku	Maluku	Maluku
			Lapas Piru (Lanjutan)
			Cabang Rutan Saparua (Lanjutan)
31	Maluku Utara	Maluku Utara	Maluku Utara
			Rutan ternate (Lanjutan)
			Rutan Weda
32	Papua Barat	Papua Barat	Papua Barat
		Rutan Raja Ampat (Target Minimal Operasional 2015)	Rutan Bintuni
33	Papua	Papua	Papua
			Lapas Abepura (Lanjutan)
			Lapas Merauke (Lanjutan)

PEMBANGUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN TAHUN 2014

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
1	NAD	NAD	NAD
		LP Blangpidie (Target Minimal Operasional 2015)	LP Banda Aceh (Lanjutan)
			Cabang Rutan Lokh Nga (Lanjutan)
			Cabang Rutan Singkil (Lanjutan)
			Rutan Bener Meriah (Lanjutan Prioritas I)
			LPKN Langsa (Lanjutan Prioritas I)
			LP Wanita Sigli (Lanjutan Prioritas I)
2	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara
	Rutan Humbang Hasundutan		Rutan Medan (Rekonstruksi)
	LP Langkat		LPKN Pematang Siantar (Lanjutan Prioritas I)
	LPKN Langkat		
3	Riau	Riau	Riau
			Lapas Pekanbaru (kulim) (Lanjutan)
			LP Terbuka Rumbai (Lanjutan Prioritas I)
4	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat
	Rutan Sawahlunto		LPKN Sawah Lunto (Lanjutan Prioritas I)
	LP Dharmasraya		LP Lubuk Basung (Lanjutan Prioritas I)
	Lapas Wanita Bukit Tinggi		Rutan Padang (Lanjutan Prioritas I)
			Lapas Klas II A Payakumbuh(Lanjutan Prioritas I)
			Rutan Klas II B Painan (Lanjutan Prioritas I)
			Rutan Talu (Lanjutan)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
5	Jambi	Jambi	Jambi
			LP Muara Sabak / Tanjung Jabung Timur (Lanjutan Prioritas I)
			LP Sarolangun (Lanjutan Prioritas I)
6	Bengkulu	Bengkulu	Bengkulu
			Lapas Bengkulu Baru (Relokasi Lanjutan)
			Lapas Mekomuko (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Lebong (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Kepahiang (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Kaur (Usulan Pembangunan Baru)
7	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan
	LPKN Palembang		Lapas Palembang (Merah Mata) (Lanjutan Prioritas I)
			Rutan Pagar Alam (Relokasi Lanjutan)
			LP Kayu Agung (Lanjuta)
			LP Banyu Asin (Lanjutan)
8	Lampung	Lampung	Lampung
			Lapas Waykanan (Lanjutan)
			LP Anak Bandar Lampung (Lanjutan Prioritas I)
			LP Gunung Sugih (Lanjutan Prioritas I)
			Lapas kotabumi (Usulan Pembangunan Baru)
9	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau
		LP Natuna (Target Minimal Operasional 2015)	LPKN Tanjung Pinang (Lanjutan Prioritas I)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
		Rutan Batam (Lanjutan)	
10	Bangka Belitung	Bangka Belitung	Bangka Belitung
			LPKN Pangkal Pinang (Lanjutan Prioritas I)
11	Banten	Banten	Banten
	Rutan Cilegon	Rutan Tangerang (Lanjutan)	
12	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta
			Rutan Salemba (Lanjutan)
			Lapas Cipinang (Lanjutan)
13	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat
	LP Cikarang Bekasi		Lapas Narkotika Bandung (Lanjutan)
	Rutan Depok		Rutan Bandung (Lanjutan)
	LP Gunung Sindur		Lapas Cibinong (Lanjutan)
	Rutan gunung sindur		Lapas Bogor (Lanjutan)
			LP Sukabumi (Lanjutan Prioritas I)
			LP Banjar (Lanjutan Prioritas I)
			LP Anak Bandung (Lanjutan Prioritas I)
			Rutan Garut (Lanjutan Prioritas I)
			LPKN Gunung Sindur (Usulan Pembangunan Baru)
			Lapas Wanita Gunung Sindur (Usulan Pembangunan Baru)
			Lapas Pasir Jambu (Usulan Pembangunan Baru)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
14	Jawa Tengah	Jawa Tengah	Jawa Tengah
			Lapas Batu NK (Lanjutan)
			Lapas Klas II A Pekalongan (Rekonstruksi)
			Lapas Purwokerto (Relokasi Lanjutan)
			Rutan Wonosobo (Usulan Rekonstruksi)
			Lapas Pasir Putih Nusakambangan (Lanjutan)
			Lapas Narkotika Nusakambangan (Lanjutan)
15	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur
	LPKN Madiun		Rutan Klas I Surabaya (REKONSTRUKSI)
	LPKN Pamekasan		
16	D.I. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
			Lapas Wirogunan (Lanjutan)
17	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat
			Rutan Bengkayang (Lanjutan)
			Lapas Wanita Pontianak (Usulan Pembangunan Baru)
18	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah
	LP Sukamara		LPKN Kasongan (Lanjutan Prioritas I)
			LP Tamiang Layang (Lanjuta Prioritas I)
19	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan
			LPKN Karang Intan (Lanjutan Prioritas I)
			LP Banjar Baru (Lanjutan Prioritas I)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
20	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
		Rutan Penajem Pasir Utara (Target Minimal Operasional 2015)	LPKN Samarinda (Lanjutan Prioritas I)
			Rutan Bontang (Lanjutan Prioritas I)
			Lapas/Rutan Sendawar (Usulan Pembangunan Baru)
21	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
			Rutan Sengkang (Lanjutan)
			Lapas Anak Pare-Pare (Lanjutan)
			Rutan Selayar (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Makale (Usulan Pembangunan Baru)
22	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara
			Rutan Raha (Relokasi Lanjutan)
23	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah
			Cabang Rutan Kolonedale (Lanjutan)
			Rutan Poso (Lanjutan)
			Cabang Rutan Leok (Lanjutan)
24	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat
	LP anak Mamuju		Rutan Pasang Kayu Mamuju Utara (Lanjutan Prioritas I)
	LP Wanita Mamuju		
25	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara
			Cabang Rutan Amurang (Lanjutan)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
26	Gorontalo	Gorontalo	Gorontalo
			LP Pahuwato (Lanjutan Prioritas I)
27	Bali	Bali	Bali
		LPKN Bangli (Target Minimal Operasional 2015)	
28	NTB	NTB	NTB
			LP Anak Mataram (Lanjutan Prioritas I)
			LP terbuka Mataram (Lanjutan Prioritas I)
29	NTT	NTT	NTT
			Lapas Anak Kupang (Lanjutan)
			Rutan Kupang (Lanjutan)
			LP Wanita Kupang (Lanjutan Prioritas I)
			LP Lembata (Lanjutan Prioritas I)
30	Maluku	Maluku	Maluku
			Cabang Rutan Saparua (Lanjutan)
			Lapas Piru (Lanjutan)
31	Maluku Utara	Maluku Utara	Maluku Utara
			Rutan Weda (Lanjutan Prioritas I)
			Rutan ternate (Lanjutan)
32	Papua Barat	Papua Barat	Papua Barat
		Rutan Raja Ampat (Target Minimal Operasional 2015)	Rutan Bintuni (Lanjutan Prioritas I)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
33	Papua	Papua	Papua
			Lapas Abepura (Lanjutan)
			Lapas Merauke (Lanjutan)

PEMBANGUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN TAHUN 2015

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
1	NAD	NAD	NAD
	LP Blangpidie		LP Banda Aceh (Lanjutan)
			Cabang Rutan Lokh Nga (Lanjutan)
			Cabang Rutan Singkil (Lanjutan)
			LPKN Langsa (Lanjutan Prioritas I)
			LP Wanita Sigli (Lanjutan Prioritas I)
			Rutan Bener Meriah (Lanjutan Prioritas I)
2	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara
			LPKN Pematang Siantar (Lanjutan Prioritas I)
			LP Langkat (Lanjutan Prioritas I)
			LPKN Langkat (Lanjutan Prioritas I)
			Rutan Humbang Hasundutan (Lanjutan Prioritas I)
			Rutan Medan (Rekonstruksi)
3	Riau	Riau	Riau
			Lapas Pekanbaru (kulim) (Lanjutan)
			LP Terbuka Rumbai (Lanjutan Prioritas I)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
4	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat
			Rutan Talu (Lanjutan)
			Lapas Wanita Bukit Tinggi (Lanjutan)
			LP Lubuk Basung(Lanjutan Prioritas I)
			Rutan Padang (Lanjutan Prioritas I)
			LPKN Sawahlunto (Lanjutan Prioritas I)
			LP Dharmasraya (Lanjutan Prioritas I)
			Rutan Sawahlunto (Lanjutan Prioritas I)
			LP Payahkumbuh (Usulan Relokasi)
			Rutan Klas II B Painan (Usulan Relokasi)
5	Jambi	Jambi	Jambi
			LP Muara Sabak (Tanjung Jabung Timur) (Lanjutan Prioritas I)
			LP Sarolangun (Lanjutan Prioritas I)
6	Bengkulu	Bengkulu	Bengkulu
			Lapas Bengkulu Baru (Relokasi Lanjutan)
			Lapas Mokomuko (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Lebong (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Kepahiang (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Kaur (Usulan Pembangunan Baru)
7	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan
			Lapas Palembang (Merah Mata) (Lanjutan)
			LP Kayu Agung (Lanjutan Prioritas I)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
			LP Banyu Asin (Lanjutan Prioritas I)
			LPKN Palembang (Lanjutan Prioritas I)
			Rutan Pagar Alam (Relokasi Lanjutan)
8	Lampung	Lampung	Lampung
			Lapas Waykanan (Lanjutan)
			LP Gunung Sugih (Lanjutan Prioritas I)
			Lapas Kotabumi (Usulan Pembangunan Baru)
			LP Anak Bandar Lampung (Lanjutan prioritas I)
9	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau
	LP Natuna		Rutan Batam (Lanjutan)
10	Bangka Belitung	Bangka Belitung	Bangka Belitung
			LPKN Pangkal Pinang (Lanjutan Prioritas I)
			LPKN Tanjung Pinang (Lanjutan Prioritas I)
11	Banten	Banten	Banten
			Rutan Tangerang (Lanjutan)
			Rutan Cilegon (Lanjutan Prioritas I)
12	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta
			Rutan Salemba (Lanjutan)
			Lapas Cipinang (Lanjutan)
13	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat
			Lapas Narkotika Bandung (Lanjutan)
			Rutan Bandung (Lanjutan)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
			Lapas Klas II A Bandung (Lanjutan)
			Lapas Cibinong (Lanjutan)
			Lapas Bogor (Lanjutan)
			LP Sukabumi Warungkiara (Lanjutan Prioritas I)
			LP Banjar (Lanjutan Prioritas I)
			LP Anak Bandung (Lanjutan Prioritas I)
			Rutan Garut (Lanjutan Prioritas I)
			LP Gunung Sindur (Lanjutan Prioritas I)
			LPKN Gunung Sindur (Lanjutan Prioritas I)
			LP Cikarang Bekasi (Lanjutan Prioritas I)
			Rutan Cilegon (Lanjutan Prioritas I)
			Lapas Wanita Gunung Sindur (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Gunung Sindur (Lanjutan)
			Lapas Pasir Jambu (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Depok (Lanjutan Prioritas I)
14	Jawa Tengah	Jawa Tengah	Jawa Tengah
			Lapas Pasir Putih Nusakambangan (Lanjutan)
			Lapas Narkotika Nusakambangan (Lanjutan)
			Lapas Batu NK (Lanjutan)
			Lapas Klas II A Pekalongan (Rekonstruksi)
			Lapas Purwokerto (Relokasi Lanjutan)
			Rutan Wonosobo (Usulan Rekonstruksi)
15	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur
			LPKN Madiun (Lanjutan Prioritas I)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
			LPKN Pamekasan (Lanjutan Prioritas I)
			Rutan Klas I Surabaya (Rekonstruksi)
16	D.I. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
			Lapas Wirogunan (Lanjutan)
17	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat
			Rutan Bengkayang (Lanjutan)
			Lapas Wanita Pontianak (Usulan Pembangunan Baru)
18	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah
			LPKN Kasongan (Lanjutan Prioritas I)
			Rutan Tamiang Layang (Lanjutan Prioritas I)
			LP Sukamara (Lanjutan Prioritas I)
19	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan
			LPKN Karang intan (Lanjutan Prioritas I)
			LP Banjar Baru (Lanjutan Prioritas I)
20	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
	Rutan Penajem Pasir Utara		LPKN Samarinda Kalimantan Timur (Lanjutan Prioritas I)
			Rutan Bontang (Lanjutan prioritas I)
			Lapas / Rutan Sendawar (Usulan Pembangunan Baru)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
21	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
			Rutan Sengkang (Lanjutan)
			Lapas Anak Pare-Pare (Lanjutan)
			Rutan Selayar (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Makale (Usulan Pembangunan Baru)
22	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara
			Rutan Raha (Relokasi Lanjutan)
23	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah
			Cabang Rutan Kolonedale (Lanjutan)
			Rutan Poso (Lanjutan)
			Cabang Rutan Leok (Lanjutan)
24	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat
			Rutan Pasang Kayu Mamuju Utara (Lanjutan Prioritas I)
			LP Anak Mamuju (Lanjutan Prioritas I)
			LP wanita Mamuju (Lanjutan Prioritas I)
25	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara
			Cabang Rutan Amurang (Lanjutan)
26	Gorontalo	Gorontalo	Gorontalo
			LP Pahuwato (Lanjutan Prioritas I)
27	Bali	Bali	Bali
	LPKN Bangli		

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
28	NTB	NTB	NTB
			LP Anak Mataram (Lanjutan Prioritas I)
			Rutan Kupang (Lanjutan Prioritas I)
			LP terbuka Mataram (Lanjutan Prioritas I)
29	NTT	NTT	NTT
			Lapas Anak Kupang (Lanjutan)
			LP Wanita Kupang (Lanjutan Prioritas I)
			LP Lembata (Lanjutan Prioritas I)
30	Maluku	Maluku	Maluku
			Lapas Piru (Lanjutan)
			Cabang Rutan Saparua (Lanjutan)
31	Maluku Utara	Maluku Utara	Maluku Utara
			Rutan Ternate (Lanjutan)
			Rutan Weda (Lanjutan Prioritas I)
32	Papua Barat	Papua Barat	Papua Barat
	Rutan Raja Ampat		
33	Papua	Papua	Papua
			Lapas Abepura (Lanjutan)
			Lapas Merauke (Lanjutan)
			Rutan Bintuni (Lanjutan Prioritas I)

BAB III

PENUTUP

Strategi penanganan overkapasitas penghuni Lapas atau Rutan dilakukan melalui pembangunan baru, pembangunan kembali (rekonstruksi) atau relokasi, pembangunan baru pada daerah pemekaran wilayah, dan rehabilitasi atau renovasi yang dilakukan berdasarkan skala prioritas.

Rencana Induk ini diharapkan menjadi acuan dalam rangka penanganan overkapasitas demi terselenggaranya pemenuhan hak terutama layak hunian dalam rangka perawatan bagi tahanan dan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana serta keterpaduan kelangsungan pembangunan Lapas atau Rutan.

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR